Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 19793-19798

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) SEBAGAI UPAYA MODERNISASI ADMINISTRASI PADA DUKCAPIL

Vidya Indah Nurhafiza[1], Christian Wiradendi Wolor[1], Wida Aristanti[1]

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta

e-mail: vidyaindahn@gmail.com

Published: Maret , 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan modernisasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang memungkinkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan secara digital melalui perangkat telepon pintar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi IKD sebagai upaya modernisasi administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Dukcapil SIAK Jakarta Selatan dengan melibatkan aparatur Dukcapil dan masyarakat pengguna aplikasi IKD sebagai partisipan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan IKD telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi kependudukan, seperti mempercepat pelayanan, mempermudah akses dokumen, serta mengurangi penggunaan dokumen fisik. Namun demikian, implementasi IKD masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan aplikasi, keterbatasan perangkat yang mendukung, serta masih adanya gangguan teknis pada sistem. Selain itu, belum semua layanan administrasi dapat sepenuhnya terintegrasi dengan sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar implementasi IKD dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung modernisasi administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Administrasi, Pelayanan Kependudukan

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged the government to modernize population administration services. One of the innovations introduced is the Digital Population Identity (IKD) application, which allows citizens to access their population documents digitally through smartphones. This study aims to examine the implementation of the IKD application as an effort to modernize administrative services at the Department of Population and Civil Registration (Dukcapil) and to identify the challenges encountered in its implementation. This research uses a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The study was conducted at Dukcapil SIAK South Jakarta and involved Dukcapil officials as well as community members who use the IKD application. The results show that the implementation of IKD has helped facilitate population administration services by speeding up service processes, providing easier access to documents, and reducing the use of physical documents. However, several challenges remain, including limited public understanding of how to use the application, device compatibility issues, and occasional technical problems within the system. In addition, not all administrative services are fully integrated with the digital system. Therefore, greater efforts are needed in terms of public socialization, improvement of technological infrastructure, and enhancement of human resource capacity to optimize the implementation of IKD in supporting the modernization of population administration.

Keywords: Digital Population Identity, Administrative, Population Services

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Modernisasi administrasi merupakan proses perubahan sistem administrasi menuju sistem yang lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi digital. Transformasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan (Safitri *et al.,* 2023). Dalam konteks administrasi kependudukan, digitalisasi pelayanan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data kependudukan serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi (Gantika dan Hidayat, 2025). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. IKD merupakan identitas digital yang menampilkan dokumen kependudukan dalam bentuk aplikasi pada perangkat gawai sehingga masyarakat dapat mengakses identitasnya secara elektronik tanpa harus membawa dokumen fisik (Asmaniah *et al.,* 2024).

Penerapan IKD diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan serta mendukung integrasi data kependudukan dalam sistem pelayanan publik berbasis digital (Nurdiana dan Ayumi, 2024). Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan seperti KTP digital, kartu keluarga, serta dokumen lainnya secara daring melalui telepon pintar. Selain itu, sistem identitas digital juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti autentikasi dan kode QR untuk memastikan keamanan data kependudukan (Pratmanto *et al.,* 2023). Namun demikian, implementasi IKD di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat serta kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi implementasi IKD. Selain itu, keterbatasan perangkat teknologi dan akses internet di beberapa wilayah juga mempengaruhi tingkat pemanfaatan identitas digital dalam pelayanan administrasi kependudukan (Rahmawati *et al.,* 2024; Purba dan Mauluddin, 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi IKD dapat meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Nurdiana dan Ayumi (2024) menyatakan bahwa penerapan IKD dapat meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Sementara itu, Putri *et al.* (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IKD tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat serta koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai upaya modernisasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi IKD serta menganalisis strategi yang dilakukan oleh instansi terkait dalam mengoptimalkan penerapan sistem identitas digital tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai upaya modernisasi administrasi kependudukan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) SIAK Jakarta Selatan pada periode Oktober hingga Desember 2025. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai proses pelaksanaan program IKD, kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta pengalaman aparatur dan masyarakat dalam menggunakan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dukcapil serta masyarakat pengguna aplikasi IKD. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan penggunaan IKD. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan digitalisasi administrasi kependudukan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan

kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data dan metode pengumpulan data (Creswell, 2014).

HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai upaya modernisasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan aparatur Dukcapil serta masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan IKD memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan, meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasinya.

Deskripsi Partisipan Penelitian

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur Dukcapil dan masyarakat pengguna aplikasi IKD. Aparatur Dukcapil berperan sebagai pelaksana pelayanan administrasi kependudukan, sedangkan masyarakat merupakan pengguna layanan yang merasakan langsung manfaat maupun kendala dalam penggunaan aplikasi IKD. Tabel 1 menunjukkan karakteristik partisipan yang terlibat dalam penelitian.

Tabel 1. Karakteristik Partisipan Penelitian

Kategori Partisipan	Jumlah	Peran dalam Penelitian
Developer sistem IKD	1 orang	Mengembangkan dan mengelola sistem aplikasi IKD
Karyawan administrasi Dukcapil	2 orang	Pelaksana pelayanan administrasi kependudukan
Pengguna aplikasi IKD	3 orang	Masyarakat yang menggunakan layanan IKD
Total	**6 orang**	Partisipan penelitian

Berdasarkan Tabel 1, partisipan penelitian terdiri dari dua kelompok utama, yaitu aparatur Dukcapil dan masyarakat pengguna layanan. Partisipan tersebut dipilih untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi IKD dari sisi pelaksana kebijakan maupun pengguna layanan.

Implementasi IKD dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara digital. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses dokumen seperti KTP digital, kartu keluarga, serta dokumen administrasi lainnya melalui perangkat telepon pintar. Penggunaan IKD juga membantu mempercepat proses pelayanan administrasi karena masyarakat tidak selalu harus membawa dokumen fisik saat mengurus layanan kependudukan. Selain itu, penerapan IKD juga mendukung efisiensi proses pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil. Petugas pelayanan dapat melakukan verifikasi identitas secara digital melalui sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional. Hal ini mempermudah proses identifikasi dan validasi data penduduk dalam pelayanan administrasi.

Kendala dalam Implementasi IKD

Meskipun memberikan berbagai kemudahan, implementasi IKD masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala yang ditemukan adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai penggunaan aplikasi IKD. Sebagian masyarakat masih belum mengetahui cara mengaktifkan maupun menggunakan aplikasi tersebut dalam proses administrasi kependudukan. Selain itu, keterbatasan perangkat teknologi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penggunaan IKD. Tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar yang kompatibel dengan aplikasi IKD. Gangguan teknis pada sistem aplikasi juga terkadang terjadi, seperti kesulitan login atau kesalahan sistem yang menyebabkan proses verifikasi data menjadi terhambat. Tabel 2 menunjukkan beberapa kendala utama yang ditemukan dalam implementasi IKD.

Tabel 2. Kendala Implementasi IKD

Jenis Kendala	Deskripsi
Literasi digital masyarakat	Sebagian masyarakat belum memahami cara penggunaan aplikasi IKD
Keterbatasan perangkat	Tidak semua perangkat telepon pintar mendukung aplikasi IKD
Gangguan teknis sistem	Terkadang terjadi kesalahan sistem atau kesulitan login
Integrasi layanan	Beberapa layanan administrasi masih memerlukan dokumen fisik

Berdasarkan Tabel 2, kendala implementasi IKD tidak hanya berkaitan dengan faktor teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan digital.

Upaya Peningkatan Implementasi IKD

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dukcapil melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan implementasi IKD. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan aplikasi IKD. Selain itu, Dukcapil juga melakukan pelatihan kepada aparatur pelayanan untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam penggunaan aplikasi IKD. Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan infrastruktur teknologi informasi serta pengembangan sistem aplikasi agar lebih stabil dan mudah digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan penggunaan IKD dapat semakin meningkat serta mampu mendukung modernisasi administrasi kependudukan secara lebih optimal.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan. Penggunaan identitas digital memungkinkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan secara lebih cepat dan praktis melalui perangkat telepon pintar tanpa harus membawa dokumen fisik. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan IKD merupakan bagian dari proses modernisasi administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Modernisasi administrasi pada dasarnya merupakan proses pembaruan sistem administrasi melalui pemanfaatan teknologi, penyederhanaan prosedur kerja, serta peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik (Muiz *et al.,* 2021). Dengan demikian, penerapan IKD dapat dipahami sebagai bentuk transformasi digital dalam administrasi kependudukan yang bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan konsep administrasi digital yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan data serta proses administrasi (Muhammad dan Setiawan, 2025). Administrasi digital memungkinkan proses pengolahan data dan dokumen dilakukan secara lebih efektif sehingga pelayanan publik dapat diberikan secara lebih cepat dan akurat (Pelis, 2024). Dalam konteks administrasi kependudukan, penerapan sistem digital seperti IKD memungkinkan integrasi data kependudukan secara lebih sistematis serta mempermudah proses verifikasi identitas penduduk dalam berbagai layanan administrasi. Oleh karena itu, digitalisasi administrasi kependudukan melalui IKD dapat dipandang sebagai upaya pemerintah dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai penggunaan aplikasi IKD. Sebagian masyarakat masih belum mengetahui cara mengaktifkan maupun menggunakan aplikasi tersebut dalam proses administrasi kependudukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi

digital masyarakat. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat dapat menjadi salah satu hambatan dalam implementasi layanan administrasi berbasis digital (Rahmawati *et al.,* 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa proses modernisasi administrasi tidak hanya memerlukan pengembangan teknologi, tetapi juga membutuhkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Selain faktor literasi digital, keterbatasan perangkat teknologi juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi IKD. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat telepon pintar yang kompatibel dengan aplikasi IKD, sehingga sebagian masyarakat masih bergantung pada dokumen fisik dalam proses administrasi kependudukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap teknologi digital yang dapat mempengaruhi tingkat pemanfaatan layanan administrasi berbasis digital. Purba dan Mauluddin (2023) menyatakan bahwa implementasi sistem identitas digital memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai agar dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, digitalisasi pelayanan publik berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam akses layanan bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi IKD belum sepenuhnya terintegrasi dengan seluruh layanan administrasi kependudukan. Pada beberapa jenis layanan administrasi, masyarakat masih diwajibkan untuk menunjukkan dokumen fisik meskipun telah memiliki identitas digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses transformasi digital dalam administrasi kependudukan masih berada pada tahap transisi sehingga memerlukan penyesuaian sistem serta integrasi antarinstansi pelayanan (Muiz dan Nasution, 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurdiana dan Ayumi (2024) yang menyatakan bahwa implementasi IKD dalam pelayanan administrasi kependudukan masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia serta struktur organisasi dalam mendukung penerapan sistem digital. Selain itu, keberhasilan implementasi IKD juga dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Sistem identitas digital tidak hanya digunakan dalam layanan Dukcapil, tetapi juga berkaitan dengan berbagai layanan publik lainnya seperti layanan perbankan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, integrasi sistem antarinstansi menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa identitas digital dapat digunakan secara optimal dalam berbagai layanan publik. Putri *et al.* (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi IKD tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi serta kemampuan aparatur dalam mengelola sistem pelayanan berbasis digital.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi IKD sebagai bagian dari modernisasi administrasi kependudukan memerlukan dukungan dari berbagai aspek, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun kesiapan masyarakat. Modernisasi administrasi tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi digital, tetapi juga mencakup perubahan dalam sistem kerja birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi aparatur pelayanan menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan implementasi IKD sebagai bagian dari transformasi digital dalam administrasi kependudukan.

KESIMPULAN

Implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan dapat mendukung modernisasi pelayanan publik melalui peningkatan efisiensi proses administrasi, kemudahan akses dokumen kependudukan, serta pengurangan penggunaan dokumen fisik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa IKD memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan serta mempercepat proses transformasi digital dalam administrasi publik. Namun demikian, implementasi IKD masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan aplikasi, keterbatasan perangkat teknologi, serta belum optimalnya integrasi sistem dengan berbagai layanan administrasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan untuk mendukung optimalisasi implementasi IKD. Diharapkan pada penelitian selanjutnya yang membahasa tentang

identitas kependudukan digital dapat dikembangkan dengan mengkaji tingkat penerimaan masyarakat terhadap layanan digital serta integrasi IKD dengan berbagai sistem pelayanan publik lainnya guna mendukung pengembangan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi.

REFERENCES

Asmaniah, A., & Rahman, F. (2024). Implementasi identitas kependudukan digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 115–124.

Creswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. *SAGE Publications*.

Gantika, G., & Hidayat, T. (2025). Peningkatan efisiensi pelayanan publik melalui digitalisasi administrasi pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 133–142.

Muhammad, M., & Setiawan, A. (2025). Digitalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 101–110.

Muiz, A., & Nasution, A. (2021). Modernisasi administrasi dalam pelayanan publik di era digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 85–94.

Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–56.

Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–56.

Pelis, P. (2024). Administrasi digital dalam pengelolaan data dan dokumen pemerintahan. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 67–76.

Pratmanto, P., & Sari, R. (2023). Pemanfaatan identitas kependudukan digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Administrasi Publik*, 9(2), 101–110.

Purba, P., & Mauluddin, M. (2023). Keamanan data dalam sistem identitas kependudukan digital. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 10(1), 33–42.

Putri, D. P. M., Said, M. M., & Abidin, A. Z. (2025). Implementasi aplikasi kependudukan digital (IKD) dalam pelayanan administrasi kependudukan. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 55–66.

Rahmawati, R., & Hidayat, T. (2024). Tantangan implementasi identitas kependudukan digital dalam pelayanan publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 89–99.

Safitri, S., & Nugroho, A. (2023). Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 134–143.